

BAB V

PELAKSANAAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

5.1. Menelusuri Kegiatan Pelaksanaan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tahapan kegiatan selanjutnya dalam pengelolaan barang milik daerah adalah kegiatan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dimulai dari pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan. Bentuk-bentuk kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut, bisa dilaksanakan dengan tidak berurutan atau simultan, disesuaikan dengan kegiatan yang ada atau lanjutan dari periode sebelumnya.

Sebagai kegiatan lanjutan dalam pengelolaan barang milik daerah, kegiatan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ini, dalam bab 5 ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana para informan yang juga sebagai pelaku langsung dalam pengelolaan barang milik daerah di pemerintah Kabupaten Kediri.

Dalam kegiatan lanjutan setelah perencanaan, yang umumnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri adalah Pengadaan Barang Milik Daerah. Informasi pertama didapatkan dari Ibu Ita, salah satu kasubag umum dan perlengkapan pada SKPD Dinas yang memiliki Realisasi Belanja

Modal cukup besar, beliau mengatakan :

“Saat APBD sudah disyahkan, adalah saat belanja kebutuhan barang yang telah direncanakan sebelum nya (RKBMD-red) dengan pengadaan. Pengadaan bisa melalui Penunjukan Langsung atau Lelang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Kediri. Saya selalu melihat kebutuhan apa yang sudah direncanakan, namun tidak bisa 100% sama dengan yang ada di RKBMD”

Lebih lanjut Bu Ita menambahkan :

“mengapa saya tidak 100% sama dengan yang ada di RKBMD, karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan dilaksanakan lagi. Seperti Merek-Spesifikasi yang direncanakan sudah tidak diproduksi lagi, perubahan harga sehingga direncanakan beli 10 ternyata hanya mampu beli 5, perubahan pemanfaatan seperti direncanakan hanya fungsi printer cetak saja, namun ternyata membutuhkan fungsi scanner, dsb”

“Perubahan Jenis dan Spesifikasi barang juga disebabkan karena permintaan pengguna langsung, seperti dari segi pemeliharaan maupun pengamanan, dan juga refrensi dari pemakaian sebelum terhadap ketahanan merek, hal ini penting karena kalo barang tidak tahan lama, proses penghapusan membutuhkan waktu yang cukup lama”

Selanjutnya peneliti mencoba untuk menggali informasi dari salah satu staf Operasional di Bidang Aset BPKAD, Bapak Oskar terkait pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Beliau mengatakan :

“Setelah pengadaan barang, laporan pengadaan selalu dilaporkan di catat di aplikasi SIMBADA. Kita tidak pernah cek dengan Catatan Perencanaan (RKBMD) tetapi kesesuaian antara nilai barang dengan nilai realisasi di Akuntansi/Perbendaharaan”

“Barang, khususnya Kendaraan Bermotor yang sudah tidak digunakan atau sudah dapat ganti baru, dan karena pertimbangan pimpinan perlu di tarik dari SKPD atau Pemegangnya, akan ditangani oleh bidang aset. Baik Pencatatan/Penatausahaan dan Pengamanan Fisiknya”

Dari pernyataan kedua informan diatas, dapat diambil makna bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yakni pengadaan barang yang tidak sesuai dengan RKBMD, Penghapusan yang cukup lama prosesnya, Penatausahaan aset yang hanya berdasarkan catata realisasi belanja modal, dan pengamanan aset tetap yang sedang tidak

digunakan berada di pembantu pengelola dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Aset BPKAD Kab. Kediri.

5.2. Mengungkap Makna Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian lanjutan dari kegiatan perencanaan pengelolaan barang milik daerah, sehingga proses perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Pelaksanaan dimulai dari perencanaan yang sudah dibuat, namun dari beberapa pernyataan informan mengenai pemaknaan pengelolaan keuangan, dapat ditarik suatu makna bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri, tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam kegiatan Pengadaan yang tidak sesuai sepenuhnya dengan apa yang sudah direncanakan dalam RKBMD mempunyai beberapa sebab alasan. Beberapa alasan yang menyebabkan perubahan dalam pengadaan barang milik daerah yang terjadi karena ketersediaan barang yang sesuai dengan RKBMD tidak tersedia di penyedia barang, sehingga dialihkan ke barang lain yang sesuai spesifikasinya. Berubahnya kebutuhan akan sebuah spesifikasi dan fungsi barang, dapat menjadikan pelaksanaan pengadaan barang tidak sesuai dengan perencanaan.

Dalam penatausahaan, dalam hal ini pencatatan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh pengelola barang milik daerah yang

dilaksanakan oleh Bidang Aset BPKAD hanya berdasarkan jumlah realisasi belanja dengan laporan fisik belanja barang milik daerah. Sekali lagi, hal ini mengungkap bahwa pengadaan barang tidak sepenuhnya sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Terkait hal ini, dikatakan oleh informan, Bapak Oskar, mengungkapkan :

“Kita melakukan pencatatan, yang penting jumlah realisasi belanja modal yang berdasarkan data dari Penbendaharaan/Akuntansi sama dengan jumlah nilai barang termasuk biaya umum yang dilaporkan oleh SKPD. Kalo tidak sama, baru direkonsiliasi, ditelusuri dimana perbedaan nilai realisasi. Tidak ada yang pernah mempermasalahkan atau mencocokkan dengan RKBMD”

Fungsi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan akan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk sementara, dilakukan pengelola barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Aset BPKAD Kab. Kediri. Hal ini menjadikan Bidang Aset BPKAD sebagai pembantu pengelola, melaksanakan tugas sebagai pengelola barang milik daerah walaupun sejatinya adalah salah satu bidang operasional salah satu SKPD yakni BPKAD. Dampaknya, seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus, adalah :

“Kita banyak menampung kendaraan yang ditarik dari pengguna barang (SKPD) baik karena sudah diganti kendaraan lain, atau karena kondisi rusak berat. Saat gudang kita penuh banyak barang milik daerah khususnya kendaraan operasional yang kita letakkan di luar ruangan dan kita titipkan di garasi Pendopo maupun Bagian Umum. Jadi pengamanan akan barang menjadi kurang terkendali dan menjadikan biaya pemeliharaan meningkat saat kendaraan akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang yang ditunjuk”

Untuk lebih memudahkan mengenai Pelaksanaan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, bentuk dan maknanya bisa dilihat di Tabel 5.1

Tabel 5.1

Pelaksanaan, Bentuk dan Makna Pelaksanaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan	Bentuk
Kegiatan Pelaksanaan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.	pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan..
Makna	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan yang tidak sesuai RKBMD ➤ Pengamanan-Pemeliharaan Barang tidak aktif di BPKAD ➤ Proses penghapusan yang lama ➤ Penatausahaan fokus di pencatatan nilai barang dengan realisasi belanja 	

Secara ringkas dapat disimpulkan ada empat makna yang bisa diungkap dari wawancara mendalam dengan informan mengenai makna kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah. Empat makna itu seperti dalam tabel 5.1 adalah : Pengadaan yang tidak sesuai RKBMD, Pengamanan-Pemeliharaan Barang tidak aktif di BPKAD, Proses penghapusan yang lama, dan Penatausahaan fokus di pencatatan nilai barang dengan realisasi belanja.

5.3. Mendalami Makna Kegiatan Pelaksanaan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

5.3.1. Pengadaan yang tidak sesuai RKBMD

Pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah, setelah perencanaan adalah pengadaan. Pengadaan merupakan proses yang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Semua barang yang sudah direncanakan dalam RKBMD, seharusnya dapat

langsung dilaksanakan melalui proses pengadaan sesuai dengan rincian barang yang ada dalam RKBMD.

Temuan di salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten, seperti yang diutarakan oleh Bu Ita, yang menyatakan bahwa tidak semua rincian kebutuhan barang yang ada dalam RKBMD bisa semua terlaksana dan realisasi. Hal ini dikarenakan ada beberapa sebab dan kondisi yang terjadi. Sebab dan kondisi yang terjadi bisa berasal dari dalam SKPD (pengguna barang) maupun dari pihak eksternal yakni penyedia barang.

Salah satu sebab tidak bisa terlaksananya pengadaan sesuai dengan RKBMD, Bu Ita menerangkan pengguna barang yang awalnya mengusulkan kebutuhan barang tertentu, melakukan perubahan atas realisasi belanja barang milik daerah. Perubahan realisasi belanja barang milik daerah ini, disebabkan ada perubahan kebutuhan akan spesifikasi dan jenis barang. Dari rencana yang sudah diusulkan dalam RKBMD sebuah mesin pencetak (*Printer*), pada perkembangan tahun berikutnya ternyata dibutuhkan juga mesin pemindai (*Scanner*). Sehingga dengan anggaran terbatas, pembelian mesin pencetak tetap dilaksanakan dengan peningkatan spesifikasi dilengkapi dengan mesin pemindai, yang berakibat juga jumlah kuantitas barang menjadi lebih kecil dari yang direncanakan.

Kendala dari pihak penyedia barang juga dapat mempengaruhi kegiatan pengadaan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini karena barang yang sesuai spesifikasi dalam RKBMD sudah tidak diproduksi oleh produsen barang. Hal ini menjadi alasan dari pengguna barang untuk tidak merealisasikan sesuai dengan yang direncanakan, karena setelah tidak diproduksi pemeliharaan operasional (*sparepart*)

akan sulit dan berbiaya mahal. Jalan keluarnya adalah dengan mengganti spesifikasi dan jenis barang dengan yang sejenis.

5.3.2. Pengamanan-Pemeliharaan Barang tidak aktif di BPKAD

Perubahan personil pegawai, termasuk pergantian pejabat pemakai Kendaraan Dinas di SKPD Pemerintah Kabupaten, menjadi salah satu sebab diperlukan pengamanan atas barang milik daerah di pengguna SKPD masing-masing. Bentuk pengamanan nya seperti yang diungkapkan oleh Pak Yunus, adalah ditariknya sementara Kendaraan Dinas Operasional Pejabat ke Gudang Bidang Aset BPKAD Kab. Kediri.

Pengamanan sebagai salah satu bagian dari kegiatan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, seperti ditambahkan oleh Pak Lorens, dapat dibagi menjadi 2 bentuk yakni Pengamanan Fisik dan Pengamanan Administrasi. Pengamanan Fisik Barang Milik dapat dilakukan dengan pemanfaatan barang milik daerah sesuai fungsinya, Penyimpanan Barang yang sedang tidak digunakan ke dalam Gudang BPKAD, pemasangan tanda kepemilikan (Plat Nomor Merah) dan Pemagaran dan penjagaan untuk aset tanah dan bangunan.

Sedangkan Pengamanan Administrasi adalah dengan melakukan Pencatatan Aset ke dalam Buku-Catatan Barang Milik Daerah, pemberian label dan kode di setiap barang milik daerah, dan tanda bukti kepemilikan yang sah. Dalam penyimpanan bukti kepemilikan, di Pemerintah Kabupaten Kediri, Bukti kepemilikan akan Tanah dan Bangunan, berupa sertifikat hak pakai, dan Kepemilikan akan Kendaraan Dinas, berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), disimpang oleh Pengelola Barang dalam hal ini

dilaksanakan oleh Bidang Aset BPKAD Kab. Kediri. Semua bukti kepemilikan akan barang milik daerah tersebut, disimpan dalam Lemari Besi Tahan Api sebagai bentuk pengamanan barang milik daerah. Sedangkan Bukti kepemilikan atas barang milik daerah selain Tanah-Bangunan dan Kendaraan Dinas disimpan oleh masing-masing Pengguna Barang.

Informasi tentang Pemeliharaan Barang Milik Daerah, disampaikan oleh Pak Yunus adalah :

"Pemeliharaan BMD adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna"

"Tujuan dari kegiatan pemeliharaan BMD adalah mencegah BMD dari kerusakan karena berbagai faktor, antara lain karena pengaruh alam (cuaca, suhu dan sinar), pengaruh air dan kelembapan, pengaruh fisik lainnya seperti benturan dan pengaruh manusia yang tidak bertanggungjawab"

Sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007, ditambahkan oleh Pak Yunus, bahwa tanggungjawab pemeliharaan barang milik daerah ada ditangan pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang atas barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.

5.3.3. Proses penghapusan yang lama

Penghapusan Barang Milik Daerah adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Menurut Pak Lorens, sebagai Ka. BPKAD menambahkan bahwa :

"Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara

optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.”

Penjelasan yang lebih detail disampaikan oleh Pak Yunus selaku Kasubid Pemanfaatan dan Penatausahaan Bidang Aset, tentang syarat-syarat barang milik daerah yang dapat dihapuskan. Pada prinsipnya semua Barang Milik Daerah dapat dihapuskan, yakni untuk Barang Milik Daerah yang merupakan barang tidak bergerak seperti Gedung Bangunan, Jalan dan Jaringan, dapat dilakukan penghapusan berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan antara lain : rusak berat, terkena bencana alam/force majeure; tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*); terkena planologi kota; kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.

Sedangkan untuk penghapusan barang bergerak syarat-syarat barang milik daerah yang dapat dihapuskan berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan antara lain : secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki; telah melampaui batas waktu kegunaannya atau kedaluwarsa; Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh; dan karena kehilangan karena mati, kecelakaan dan hal yang tidak terduga lainnya.

Lebih lanjut pak Yunus menerangkan bahwa wewenang penghapusan barang daerah berupa barang tidak bergerak seperti Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain Tanah dan/atau Bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Yang menjadi kendala adalah proses penghapusan Barang Milik Daerah, yang harus melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Tugas Panitia Penghapusan adalah meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.

Selanjutnya Pengelola Barang Milk Daerah (Sekretaris Daerah) mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/diHibahkan atau dimusnahkan.

5.3.4. Penatausahaan fokus di pencatatan nilai barang dengan realisasi belanja.

Dalam permendagri No. 17 Tahun 2007, Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang

milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang. Setiap kepala SKPD (melalui penyimpan/pengurus barang) wajib melakukan penatausahaan BMD yang ada pada pengguna masing-masing. Di Kabupaten Kediri, Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pencatatan BMD dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Menurut Bapak Oskar, Pencatatan atau pembukuan ke dalam SIMBADA dilakukan menurut laporan dari Pengguna Barang, baik laporan Barang yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun dari Penerimaan lainnya yang sah seperti Hibah, Blockgrant, dsb.

Pencatatan dilakukan menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Untuk setiap barang milik daerah yang tergolong sebagai aset tetap, akan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). KIB terdiri dari :

1. KIB-A: Tanah,
2. KIB-B: Mesin dan Peralatan,
3. KIB-C: Gedung dan Bangunan,
4. KIB-D: Jalan, Irigasi dan Jaringan ,
5. KIB-E: Aset Tetap Lainnya,
6. KIB-F: Konstruksi dalam Pengerjaan.

Lebih lanjut Bapak Oskar menerangkan bahwa, penatausahaan berupa pencatatan barang milik daerah yang dikuasai oleh pengguna barang (SKPD) dilakukan oleh masing-masing SKPD melalui Pengurus/Penyimpan Barang hanya dilakukan di akhir tahun anggaran. Pencatatan di akhir tahun anggaran ini meliputi semua perolehan barang milik daerah, baik yang melalui pengadaan maupun penerimaan lainnya yang sah sejak, yang periode perolehannya dari awal tahun anggaran

(bulan Januari) sampai akhir tahun anggaran (bulan Desember). Hal ini terjadi selain karena perhitungan realisasi belanja modal atas barang milik daerah yang baru tuntas di akhir tahun anggaran dan juga karena sistem pembuatan database SIMBADA yang baru bisa dibuat menunggu hasil dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

Perolehan barang melalui pengadaan yang menggunakan dana dalam APBD, harus dicatatkan ke dalam SIMBADA sebesar nilai pengadaan barang ditambah dengan biaya-biaya umum. Biaya umum ini merupakan biaya pendukung dan biaya administrasi yang timbul atas kegiatan pengadaan barang milik daerah dan biaya pendukung teknis barang, seperti biaya Honorarium, Biaya Survey, Biaya Pembuatan Dokumen, Biaya Instalasi/Pemasangan agar barang milik daerah yang dibeli dapat berfungsi dan siap digunakan. Nilai total dari biaya-biaya umum pengadaan barang milik daerah pada umumnya baru didapatkan dari Bagian Perbendaharaan/ Akuntansi pada akhir tahun anggaran, sehingga pengurus/ penyimpan barang baru akan melakukan pencatatan nilai dan barang yang diperoleh dari pengadaan ke dalam SIMBADA setelah nilai total realisasi belanja modal untuk barang milik daerah.

5.4. Ringkasan

Melalui penelusuran makna kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah di situs penelitian ditemukan ada empat makna kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu Pengadaan yang tidak sesuai RKBMD, Pengamanan-Pemeliharaan Barang tidak aktif di BPKAD, Proses penghapusan yang lama, dan Penatausahaan fokus di pencatatan nilai barang dengan realisasi belanja.

Pengadaan yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam RKBMD yang dilaksanakan oleh SKPD dikarenakan adanya perubahan akan kebutuhan dan spesifikasi atas barang milik daerah yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu ketidaksesuaian dalam pengadaan terjadi karena adanya barang yang sudah tidak diproduksi oleh produsen, sehingga pengguna barang harus mengalihkan ke barang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan akan barang milik daerah di SKPD masing-masing.

Pengamanan-Pemeliharaan Barang merupakan salah satu tugas dari Pengelola Barang yang dilaksanakan oleh Bidang Aset BPKAD. Bentuk pengamanan Barang milik daerah terdiri dari pengamanan fisik dan pengamanan administrasi. Pengamanan fisik yang dilakukan oleh Bidang Aset BPKAD dilakukan khusus untuk barang milik daerah khususnya Kendaraan bermotor yang sedang tidak digunakan oleh pengguna sehingga dikembalikan sementara ke pengelola barang untuk dilakukan pengamanan barang. Sedangkan pengamanan administrasi yang dilakukan oleh Bidang Aset BPKAD yakni pengamanan tanda bukti kepemilikan atas Tanah dan Bangunan serta Kendaraan Bermotor yang disimpan di dalam Lemari Tahan Api.

Tahapan penghapusannya yang dimaknai oleh informan di pemerintah kabupaten Kediri, adalah proses penghapusan barang milik daerah yang telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang mengharuskan adanya tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang, seperti barang sudah rusak berat, barang sudah kadaluarsa, dan hal – hal teknis lainnya. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian kepada Kuasa Pengguna Barang dan/atau

Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penatausahaan barang milik daerah di situs penelitian di Pemerintah Kabupaten Kediri, dilaksanakan dengan pencatatan atas penerimaan barang milik daerah dari hasil pengadaan dan perolehan lainnya yang sah, ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Untuk Perolehan dari hasil pengadaan dengan sumber dana dari APBD Kab. Kediri, dilakukan sesuai jenis barang dan nilai yang dilaporkan merupakan nilai barang ditambah dengan biaya-biaya umum yang terkait.